

## **Siaran Pers**

### **Acara Temu Perempuan tentang Tanggung Jawab Kepemimpinan Nasional bagi Pemenuhan Hak Hak Konstitusional Perempuan**

**Jakarta 24 Juni 2009**

Pada hari ini Komnas Perempuan mengumpulkan 80 perempuan pemimpin yang mempunyai visi, komitmen dan basis pengalaman yang penting dijadikan pijakan bagi bangunan agenda kepemimpinan nasional lima tahun ke depan. Mereka akan menghasilkan sejumlah masukan konkrit berupa aspirasi perempuan terkait agenda kepemimpinan nasional 2009-2014 dan sehubungan dengan pemenuhan hak-hak perempuan. Dokumen aspirasi ini akan diserahkan kepada para Capres, kepada para moderator dalam debat-debat Capres atau Cawapres y.a.d., kepada jaringan perempuan di daerah-daerah ( terutama daerah-daerah kampanye para Capres / Cawapres) dan kepada publik secara umum.

Lima tahun ke depan adalah penentu arah perkembangan bangsa dan esensi perjuangan kita 20 tahun lagi: apakah kita masih akan terus berada dalam posisi defensif membela hak kita untuk bebas berpakaian dan berekspresi sesuai jati diri kita serta meghadapi kebijakan kebijakan baru yang justru melakukan kriminalisasi terhadap perempuan atas nama moralitas dan agama? Ataukah , masalah –masalah ini bisa diselesaikan secara tuntas dalam 5 tahun kedepan ini, melalui kepemimpinan nasional yang tanggap terhadap tanggung jawab memenuhi hak-hak perempuan, sehingga kita bisa berkonsentrasi penuh pada penanganan masalah-masalah besar yang melanda bangsa kita sebagai warga Indonesia yang sekaligus warga global ( Global Citizen), seperti globalisasi ekonomi dan pemiskinan; penantaan ulang system pengelolaan sumber daya alam – air, tanah , hutan kita; pengembangan system ketatanegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang menjamin keadilan bagi semua. Pada hari ini, Komnas Perempuan mengambil langkah bersama para perempuan pemimpin Indonesia untuk memberikan pandangannya tentang agenda-agenda nasional mana yang harus dijadikan prioritas agar jaminan-jaminan konstitusional yang tertera dalam UUD Negara RI 1945 sungguh-sungguh bisa terpenuhi bagi perempuan Indonesia. UUD Negara RI 1945 – Konstitusi Indonesia – merupakan janji bangsa dan kontrak sosial yang harus kita tagih pemenuhannya bagi semua warga negara Indonesia, termasuk kaum perempuan, kaum miskin dan kaum minoritas. Titik pijak perjuangan kaum perempuan adalah pengalaman dan aspirasi khas perempuan, tapi mimpinya adalah mimpi keadilan, demokrasi dan HAM bagi semua warga Indonesia dan umat manusia di dunia.

Empat tema yang akan dibahas hari ini menyangkut : kebijakan diskriminatif dan integritas system hukum nasional; perempuan, pemiskinan dan migrasi pendidikan yang adil gender; serta penanganan pelanggaran masa lalu. Rangkuman dokumen aspirasi akan dikomunikasikan kepada pers melalui Konperensi Pers di Komnas Perempuan, besok pada hari kamis, tanggal 25 Juni 2008, jam 10.00